

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hampir bisa dipastikan, bahwa setiap negara di dunia memiliki sebuah ideologi, yang dijadikan dasar dalam bernegara. Seperti halnya negara Indonesia yang memiliki ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Ideologi bisa diartikan sebagai pedoman hidup atau bisa diartikan sebagai eksistensi suatu bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disisi lain, Pancasila sering juga disebut *way of life, weltanschauung, wereldberschouwing, wereld en levens beschouwing*, atau dengan pengertian sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, serta petunjuk hidup.

Darmodiharjo, *et al*, (1991: 17-19), dalam bukunya Santiaji Pancasila, menyebutkan ada delapan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila, antarlain; 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 4) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, 5) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Indonesia, 6) Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, 7) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 8) Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari konsepsi-konsepsi mengenai hal yang berkaitan dengan Pancasila di atas, selain Pancasila dijadikan sebagai fasafah dalam negara Indonesia, Pancasila bisa juga disebut sebagai norma dasar bangsa Indonesia. Menurut Hans Kelsen dalam Muttaqien, R (2013-5), norma adalah “sesuatu yang *seharusnya* ada atau *seharusnya* terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.” Norma dasar berarti ketentuan-ketentuan dasar bagaimana seseorang harus berperilaku. Dalam hal ini norma dasar tersebut sama

dengan apa yang dimaksud oleh Darmodijharjo, di atas bahwa Pancasila dasar filsafat hidup orang-orang Indonesia.

Pancasila sebagai norma dasar adalah sebuah norma yang digagas oleh *founding father*, Ir. Soekarno yaitu sebagai sumber *materil* dari konstitusi suatu negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai UUD NRI 1945.

Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya; yaitu, suku, agama, ras, bahasa, bangsa dan golongan yang terintegrasi dalam suatu perekat nasionalisme, dengan filsafat Bhineka Tunggal Ika, yaitu walaupun Indonesia berbeda-beda kebudayaan, kepercayaan, bahasa, dan ras, tetapi Indonesia adalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah ini dikembangkan oleh para ahli menjadi suatu rumpun keilmuan dalam kajian *culture studies* yang disebut dengan kajian multikultural.

Multikultural adalah sebuah pemahaman setiap keberagaman yang sadar akan kepentingan bersama dalam sebuah wujud cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Senada dengan itu Kalidjernih (2009:107), menjelaskan:

umumnya konsep multikultural atau bangsa multikultur (*multicultural nation*) dipandang sebagai konsep dan gerakan yang menjunjung nilai kemajemukan yaitu keanekaragaman komunal yang muncul dari perbedaan-perbedaan ras, etnis, bahasa dan kepercayaan religius. Tingginya frekuensi pertemuan pelbagai budaya dan bahasa membuat hubungan-hubungan antar masyarakat semakin beranekaragam dan kompleks.

Hampir bisa dipastikan, dari sejumlah pulau di Indonesia, yang terdiri dari Provinsi-provinsi secara keseluruhan memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa provinsi misalnya Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Riau, Bangka, Bengkulu, Jambi, dan Lampung.

Provinsi Lampung, seperti diketahui adalah sebuah wilayah yang memiliki keanekaragaman suku. Hadikusuma (1990:2), mengatakan bahwa Lampung dari aspek *historis*, interaksi *ulun lappung* (orang lampung atau etnis lampung) dengan masyarakat luar sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu, antara lain dengan

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Pii Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cina, Banten, Bugis, dan Jawa baik dalam program kolonisasi maupun transmigrasi.

Menurut Pelzer dalam Petric Levang, (2003:9-10), menyatakan:

Pada zaman kolonisasi, transmigrasi pertama kali di Indonesia berkisar pada tahun 1905-1931, masa ini disebut fase percobaan. Pemerintahan kolonial menugasi Asisten Residen, H.G. Heijting, untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk Jawa dari keresidenan Kedu ke daerah-daerah di luar Jawa. Pemerintah Belanda pertama-tama membangun kelompok inti yang terdiri dari 500 kepala keluarga. Keluarga-keluarga itu yang mendapat jaminan hidup selama tahun pertama, mungkin saja kemudian diikuti oleh keluarga lain pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu akan meringankan biaya. Setiap keluarga yang diberi subsidi itu tentunya dapat mendatangkan sanak saudara mereka sehingga lambat laun akan memicu arus migrasi spontan. Dalam fase percobaan ini transmigran ketanah Lampung adalah Gedong Tataan dan Wonosobo (Kota Agung-Lampung). Kemudian disusul gelombang transmigrasi kedua berkisar tahun 1931-1941 yaitu daerah kota Metro dan Suka Dana.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga Belanda angkat kaki pada tahun 1949, Petric Levang, (2003:11), menjelaskan Indonesia diguncang kemelut aksi politis dan gerilya. Setelah kerusuhan-kerusuhan pada awal tahun 1950-an berakhir, Indonesia menghadapi masalah demobilisasi tentara pembebasan. Cadangan Tentara Nasional (CTN), kelompok pejuang yang tidak begitu terkontrol, membentuk “peleton otonom” dan mendirikan sejumlah desa perintis di Sumatra bagian selatan, guna untuk memudahkan dan terutama untuk mengawasi pengembalian kaum militer ke kehidupan sipil, pemerintah mendirikan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) pada tahun 1951. Dalam kurun waktu kurang dari tujuh tahun biro itu menempatkan sekitar 25.000 jiwa ke beberapa lokasi di daerah Lampung. Karena terbina dan termotivasi, para transmigran BRN menjadi cikal-bakal beberapa pusat pemukiman seperti Sumberjaya, Tanjungraya, dan Sri Bhawono

Transmigrasi ke tanah Lampung tidak hanya berhenti pada pemerintahan Soekarno, tetapi berlanjut dalam pemerintahan Soeharto, yaitu program

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Gambaran singkat dari aspek historis mengenai perpindahan penduduk dari tanah Jawa ke Provinsi Lampung baik dari program “*kollonisatie*” dan “transmigrasi” menyimpulkan bahwa, derasnya perpindahan penduduk dari pulau jawa ketanah Lampung akibat demografi Pulau Jawa mengakibatkan Lampung menjadi masyarakat minoritas.

Dari aspek geografis, Lampung merupakan Provinsi yang sangat potensial terhadap arus pertukaran budaya, di karenakan Lampung adalah wilayah gerbangnya Pulau Sumatra yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Provinsi Banten).Seperti diketahui Pulau Sumatera-Jawa dipisahkan oleh Selat Sunda. Lampung-Jawa dapat ditempuh melalui jalur laut dan udara, jalur laut melalui pelabuhan Bahauheni dan jalur udara melalui Bandara Radin Intan II.

Barth, (1969), dalamMargaret R dan Irianto S, (2011), menyatakan dari data BPS(2000, 2003, 2010), jumlah *ulun* Lampung sangatsedikit dibandingkan dengan populasi pendatang.Perkiraan komposisi penduduk berdasarkan suku bangsaadalah Jawa sebesar 61,88%, Lampung sebesar 11,92%,Sunda (termasuk Banten) sebesar 11,27%, Semendo danPalembang sebesar 3,55%, dan suku bangsa lainnya(Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, dan lain-lain), sebesar11,35%. Komposisi tersebut memang tidak dapatdipisahkan dari sejarah kontak *ulun* Lampung denganorang lain selama ratusan tahun sehingga mereka lebihterbuka dan identitasnya semakin cair. Selain itu,perkawinan dengan etnis lain juga menjadikan batas-batasidentitas menjadi kabur sehingga sukarmenentukan batas-batas yang menunjuk pada suatubatasan sosial dan wilayah.

Setiap budaya, tentulah memiliki keunikan masing-masing, baik dari bahasa, adat istiadat, kepercayaan, ataupun tradisi-tradisi tertentu, yang membentuk kebiasaan-kebiasan yang disetujui bersama oleh kelompoknya. Senada dengan itu, Rachels (2004:42), mengatakan bahwa setiap budaya tertentu memiliki kode moral yang berbeda, pengertian ini sering disebut dengan teori *relativisme cultural*. Alur pemikiran ini mungkin membawa lebih banyak lagi orang untuk menjadi skeptis mengenai etika daripada yang lain. Secara gamblang pemikiran itu menyatakan tidak ada hal yang disebut kebenaran universal dalam etika; hanya

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piiil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikutural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ada kode-kode budaya yang bermacam ragam, dan tidak lebih dari itu. Lebih lanjut, kode kita hanyalah satu dari antara yang banyak.

Tokoh pelopor sosiolog Willian Graham Summer, menulis pada tahun 1906, yang dikutip oleh Rachels (2004:45-46) mengatakan:

Jalan yang “benar” adalah jalan yang ditempuh oleh para pendahulu dan yang telah diturunkan. Tradisi itu menjadi pembenaran dirinya sendiri. Tradisi tidak bisa diuji untuk pembenaran atas dasar pengalaman. Kebenaran harus dipahami menurut tata cara masyarakat yang bersangkutan, tidak menurut asal-usul yang lepas, dari luar mereka, dan dibawa masuk untuk menguji tradisi. Menurut tata cara masyarakat, apapun yang ada, adalah benar. Mengapa demikian? Karena tata cara itu bersifat tradisional, dan karena memuat dalam dirinya wewenang dari roh-roh nenek moyang. Jikalau kita sampai pada tata cara masyarakat setempat, kita berada pada akhir analisis kita.

Paling tidak, jika memahami dari konsep *relativime kultural* yang dikemukakan oleh Rachel di atas, bisa diambil beberapa kesimpulan, untuk mencari pendekatan mengenai budaya-budaya dalam masyarakat tertentu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam suatu masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya. Provinsi Lampung misalnya, dari sekian banyak suku yang telah berada di Bumi Lampung saat ini, tentulah mempunyai kode-kode moral dari setiap suku yang ada di Lampung tersebut. Maka dari itu, diperlukan pengetahuan, yang komprehensif, agar bisa memahami dan menghargai dari setiap budaya-budaya yang ada di Lampung.

Salah satu sifat hidup masyarakat Lampung adalah *Piil Pesinggiri*, orang Lampung menyebutnya *Piil*. Hadikusuma (1990:119), menulis kata-kata atau kalimat yang sering diucapkan oleh orang Lampung yaitu:

*Tando nou ulun Lapping, wat pi'il pesinggiri, yaou balak pi'il ngemik malou ngigau diri. Ulah nou bejuluk you be-adek, Iling Mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, nyubali jejamou, begawiy balak, sakai sembayan”.*

Terjemahannya:

Tandanya orang lampung, ada *piil pesinggiri*, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih, bernama besar dan bergelar. Suka

bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.”

Lebih lanjut, Hadikusuma (1990:15), mengatakan, orang Lampung mewarisi sifat perilaku dan pandangan hidup yang disebut *Piil Pesinggiri* yang berunsurkan sebagai berikut:

1. *Pesinggiri*, mengandung arti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan perilaku.
2. *Juluk Adek*, mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat.
3. *Nemui Nyimah*, mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka.
4. *Nengah Nyappur*, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.
5. *Sakai Sambayan*, mengandung arti suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaaan.

Kalau disimak, dari beberapa point diatas, nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hidupnya orang Lampung (*piil pesinggiri*) mempunyai nilai-nilai atau pola kehidupan yang baik secara prinsip. Nilai ini, bisa disebut sebagai norma dasarmasyarakat Lampung. Bagaimana mereka, mempunyai prinsip *Pesinggiri*, yaitu suatu kepribadian yang kuat, teguh dalam pendiriannya, dalam setiap perilaku orang Lampung, serta diikuti dengan empat nilai menurut Hadikusuma di atas.

Nilai *Piil Pesinggiri* pada masyarakat adalah nilai filosofi yang berbentuk harga diri, tetapi lebih tepatnya nilai budaya *Piil Pesinggiri* itu adalah nilai pandangan hidup bagi orang Lampung. Jadi sangat wajar jika *ulun Lampung* hari ini misalnya mencoba merekonstruksi kembali nilai-nilai budayanya untuk menahan baik secara identitasnya untuk mempertahankan gempuran budaya yang semakin kompleks.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Risma Margaretha (2011) mengenai “*Piil Pesinggiri: Modal Budaya dan Strategis Identitas Ulun Lampung*” menyimpulkan bahwa diperlukan kesadaran bagi masyarakat Lampung untuk setara atau sejajar dengan pendatang sebagai “*sense of collectivism*” dengan

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menemukan nilai yang bersumber dari tradisi mereka membuat ulun Lampung dapat mengangkat kembali identitas mereka sebagai etnis lokal yang bermartabat.

Dalam penelitian Sulistyowati dan Risma Margaretha (2011), dapat juga dimaknai bahwa kondisi Lampung hari ini mengalami sebuah keseriusan dalam eksistensinya sebagai etnis Lampung yang semakin termarginalkan akibat perubahan budaya baik dalam perspektif difusi atau asimilasi dan sejenisnya atau dalam tantangan sebagai masyarakat multikultural, nasional dan global.

Secara fakta, hari ini tantangan *ulun Lappung* hari ini sangatlah kompleks, disamping mereka adalah suku yang minoritas yang harus mempertahankan identitasnya didalam masyarakat yang multikultural, disisi lain gempuran juga terjadi pada kemajuan zaman yang harus melibatkan *ulun Lappung* untuk siap dan tanggap terhadap arus globalisasi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis global disebabkan berbagai alasan yang dipicu oleh perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat global. Kenichi Ohmae dalam Budimansyah (2009:2), mengatakan bahwa, dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif tetap. Namun, kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern.

Sehubungan dengan hal itu Branson, dalam Budimansyah (2007:1), menyatakan bahwa:

*“Globalization and its potential for advancing or inhibiting human rights and democracy is more than a subject for debate among academics. This powerful force is affecting the lives of individuals no matter where in this earth they live.”*

Globalisasi dengan semua potensi yang memungkinkan berkembangnya atau tertundanya proses demokrasi dan pemajuan hak azasi manusia, lebih dari sekedar sebagai wacana akademik. Kekuatan yang lebih dahsyat adalah bahwa globalisasi itu akan mempengaruhi kehidupan manusia di mana pun ia hidup. Senada dengan pendapat di atas, Kalidjernih (2009:118) menyatakan bahwa:

**Edi Siswanto, 2014**

*Pelestarian budaya Piiil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Globalisasi dapat mendorong terbentuknya suatu budaya global baru yang lebih luas. Hal itu dapat berupa globalisasi budaya, dengan ditandai oleh aliran tanda-tanda, simbol-simbol dan globalisasi informasi diseluruh dunia dan reaksi terhadap aliran ini. Kekuatan ini memungkinkan jangkauan informasi yang luas sehingga dapat dikonsumsi lebih banyak orang. Ini berarti bahwa masyarakat diberbagai pelosok dunia bukan hanya berbagi pengetahuan melainkan juga berbagi masalah, seperti kejahatan lintas negara.

Masyarakat Lampung atau *Ulun Lappung*, hari ini mau tidak mau memasuki sebuah kenyataan bahwa ekspansi proses transnasional dan fleksibilitas pergerakan populasi, kapital dan teknologi akan membawa tantangan terhadap kedaulatan dan eksistensinya baik sebagai identitas lokal, dan nasional. Senada dengan itu, Kalidjernih, (2009:23), menjelaskan di satu pihak, kemajuan teknologi informasi dan pertukaran gagasan secara lintas batas. Di lain pihak, gerakan individu semakin fleksibel dan kurang loyal pada tempat. Kondisi ini lazim dijuluki sebagai krisis batas-batas.

Untuk mengantisipasi segala tantangan yang ada, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpotensi untuk menjawab serta mempersiapkan warga negaranya agar tanggap serta mempunyai pemikiran yang kritis terhadap arus globalisasi, yaitu melalui pendidikan multikultural. Pengembangan masyarakat multikultural yang demokratis menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (*pluralitas*) dan keanekaragaman (*heterogenitas*), karena multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Nurul Zuhria tahun 2011, dengan melakukan penelitian tentang pengembangan model pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal, menghasilkan beberapa hal diantaranya adalah model pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan multikultural mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Keefektifan model pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan multikultural mahasiswa tergantung pada penggunaan desain,

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piiil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

metode, dan sintak pembelajaran inkuiri sosial secara benar dan kontekstual dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk itu, dalam konteks membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh, nilai-nilai kearifan (kearifan sosial dan kearifan budaya) dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dengan nilai kearifan sosial dan kearifan budaya, akan berusaha mengeliminir berbagai perselisihan dan konflik budaya yang kurang kondusif.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, Puwasito, (2003:147), menyatakan, harus ada usaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi embrio atau mendasari terjadinya konflik, yaitu (1) prasangka historis, (2) diskriminasi, dan (3) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab XIII, tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 32 ayat 1 menyebutkan; negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian diperkuat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Nomor 20 tahun 2003, secara prinsip telah termaktub di pasal (4), di mana dijelaskan bahwa:

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai keagamaan dan kultural. Pendidikan multikultural dipandang efektif dan relevan diterapkan dalam upaya membangun sistem demokrasi substansial, terutama di era desentralisasi dan otonomi daerah serta masyarakat heterogen.

Dari kedua landasan yuridis diatas, mengisyaratkan bahwa negara dalam konteks ini adalah Indonesia, secara hukum telah menjamin hak-hak individu,

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piiil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

serta kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sekaligus sebagai kekayaan budaya nasional yang harus dilestarikan.

Maka dalam hal ini tidak heran jika masyarakat Lampung, telah membentuk suatu komunitas yaitu Majelis Punyimbang Adat Lampung atau yang dikenal oleh masyarakat Lampung (MPAL), yang secara khusus mempunyai peran untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Lampung. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengambil peran dalam bentuk mengadakan kegiatan atau *ivent* yang sering dikenal dengan Festival Krakatau, sedangkan di Kabupaten Waykanan dikenal dengan istilah Festival Radin Jambat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah selaku kepala daerah untuk melestarikan serta mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal Provinsi Lampung. Tapi dalam kenyataannya, kegiatan yang telah diselenggarakan serta MPAL dalam konteks ini, yang mengemban amanah untuk melestarikan budaya Lampung belum menuai hasil yang signifikan, salah satu alasannya adalah kegiatan ini masih bersifat temporal atau setahun sekali.

Dari beberapa uraian di atas, mengenai kondisi masyarakat Lampung yang multikultural dan derasnya arus globalisasi, pastilah berimplikasi pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat Lampung. Pertanyaan sederhana adalah bagaimana masyarakat Lampung hari ini memaknai nilai-nilai budayanya? dan bagaimanakah masyarakat Lampung dalam melestarikan nilai-nilai budayanya sebagai kekayaan budaya nasional? masyarakat Lampung yang dimaksud transmigrasi atau atau Lampung pribumikah?

Kemudian dalam sebuah kajian Pendidikan Kewarganegaraan, diperlukan beberapa konsep mengenai persiapan yang harus dilakukan oleh negara dalam menyongsong era kedepan agar siap dan tanggap dengan segala kemungkinan, negara dalam hal ini bukan dalam pengertian sebagai *korp* dalam satu kedaulatan yang pasif, melainkan negara atau *korp* yang aktif atau berdaulat. Warga yang merupakan kesatuan kolektif dalam sebuah negara haruslah berperan secara aktif dalam membangun, sekaligus mempertahankan negaranya dalam segala macam bentuk tantangan, baik dari dalam, maupun dari luar.

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piiil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Senada dengan itu, Cogan and Derricot (1998: 116) menyatakan, ada delapan karakteristik warganegara abad ke-21 adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis
5. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)
6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
7. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional

Dari beberapa paparan diatas, maka dalam hal ini peneliti perlu untuk mengadakan sebuah penelitian, dalam bentuk kearifan lokal, yaitu mengenai pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam masyarakat multikultural Lampung, dalam konteks Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*). Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpotensi dalam bidang kajian pembentukan kewarganegaraan yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Senada dengan itu Winataputra (2001) dalam Rahmat *et al* (2009: 4), menjelaskan bahwa secara keilmuan PKn memiliki *body of knowledge* yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga domain *citizenship education* yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural.

Dari beberapa konsep mengenai kajian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain sosial kultural, atau penelitian dalam kajian *civic culture*.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimanakah

pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam adat Lampung untuk mewujudkan masyarakat multikultural, tetapi secara khusus akan dikembangkan agar lebih fokus dalam penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung?
2. Apakah yang menjadi hambatan pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung?
3. Apakah Upaya dalam penanggulangan hambatan pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, serta situasi keadaan atau bahasa lain realitas nilai *Piil Pesinggiri* dalam adat Lampung sebagai suku minoritas yang secara simbolis pada tanah kelahirannya, dalam konteks mewujudkan masyarakat multikultural serta pelestarian budaya sebagai kekayaan budaya nasional.

#### 2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan diatas, secara khusus tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara ilmiah sekaligus memahami variabel-variabel terpenting dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Menggali informasi, serta situasi dalam menanamkan serta melestarikan budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung.
- b) Menggali informasi, serta situasi mengenai hambatan atau kendala dalam melaksanakan serta melestarikan budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung.
- c) Menggali informasi, mengenai penanggulangan hambatan pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Edi Siswanto, 2014

*Pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung: Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan masalah-masalah kebudayaan pada suku minoritas dalam konteks kajian sosial budaya dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, serta pelestarian kebudayaan nasional, dan ilmu-ilmu humaniora pada umumnya. Manfaat teoretis lain jelas penggunaan teori kontemporer, sebagai teori-teori poststrukturalisme dalam rangka menampilkan makna secara maksimal.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

- a) Tergalinya informasi, serta situasi dalam menanamkan serta pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakatmultikultural Lampung.
- b) Tergalinya informasi, serta situasi mengenai hambatan atau kendala dalam melaksanakan serta pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung.
- c) Tergalinya informasi, serta situasi apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan serta melaksanakan pelestarian budaya *Piil Pesinggiri* dalam masyarakat multikultural Lampung.

## E. Sistematika Penulisan

Tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni: bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan serta bab V tentang kesimpulan dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, pembahasan dari kelima bab ini secara singkat diuraikan dibawah ini.

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis. Bab II tentang kajian pustaka. Pada bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: konsepsi pelestarian budaya, konsepsi

budaya *Piil Pesinggiri*, konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, prosedur penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.